



**REVIU PERJANJIAN KINERJA (PK)**  
**KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**  
**TAHUN 2021**

**KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Negara/Lembaga /Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tahun 2021 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Reviu Perjanjian Kinerja memuat beberapa sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target yang ditetapkan dan diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dibidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut yang disusun pada saat setelah menerima alokasi anggaran. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Reviu Perjanjian Kinerja juga merupakan komitmen pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Melalui dokumen reviu perjanjian kinerja, pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Juli 2021

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN  
UTAMA TANJUNG PRIOK



Dr. CAPT. WISNU HANDOKO, M.Sc

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19731031 199903 1 002



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. CAPT. WISNU HANDOKO, M.Sc  
Jabatan : KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : R. AGUS H. PURNOMO  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Juli 2021

PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN  
UTAMA TANJUNG PRIOK

  
Dr. CAPT. WISNU HANDOKO, M.Sc.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731031 199903 1 002

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

| NO. | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  |  | SATUAN | SATUAN | RUMUSAN  |
|-----|--|--|--|--------|--------|--|
| 1   | SK.1<br>Terwujudnya SDM OP Utama yang Kompeten dan Profesional                     | IKK. 1<br>Prosentase SDM yang memenuhi persyaratan jabatan (pangkat dan golongan, diklat umum dan teknis untuk setiap jabatan fungsional)                      |  | %      | 100    | Indikatornya adalah persentase jumlah pegawai yang telah melakukan diklat dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai.<br>Rumus:<br>- Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi kurang dari 50 orang = 50%<br>- Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi 50 sampai dengan 80 = 75%<br>- Jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi di atas 80 orang = 100% |
| 2   | SK.2<br>Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di OP Utama | IKK. 2<br>Nilai Persepsi Publik terhadap pelayanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok<br>- Indeks persepsi korupsi<br>- Unit pengendali gratifikasi |  | nilai  | 4      | nilai skala 4, didapatkan dari hasil survei terhadap pengguna jasa   |
| 3   | SK.3<br>Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di OP Utama                  | IKK. 3<br>Prosentase penyerapan anggaran OP Utama<br>IKK. 4<br>Percentase Pengelolaan BMN  |  | %      | 97     | Indikator Prosentase penyerapan anggaran OP Utama adalah persentase perbandingan nilai penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan dengan total nilai anggaran yang diperoleh Otoritas Pelabuhan.<br>Rumus:<br>$\% = (\text{nilai penyerapan anggaran (Rp) / total nilai anggaran yang diperoleh (Rp)}) \times 100\%$                                  |
|     |  | IKK. 5<br>Percentase pencapaian target PNBP  |  | %      | 100    | Indikator Pencapaian Target PNBP adalah persentase perbandingan nilai realisasi PNBP dengan target PNBP yang telah ditetapkan.<br>Rumus:<br>$\% = (\text{Nilai realisasi PNBP (Rp) / target PNBP (Rp)}) \times 100\%$  |
| 4   | SK.4<br>Terwujudnya system digitalisasi informasi yang                             | IKK. 6<br>Tingkat kehandalan system informasi di pelabuhan   |  | %      | 90     | disebutkan jumlah system informasi digital dan dilakukan penilaian kehandalan untuk masing-masing system digital tiap terminal.<br>Rumusan:  |

| NO. | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | SATUAN | RUMUSAN |   |
|-----|--|-------------------|--|--------|---------|---|
|     | terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional  | IKK. 7            | Nilai Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama  | Nilai  | 4       | Indikator Persepsi publik terkait pelayanan informasi di OP Utama adalah penilaian kepuasan masyarakat/pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan OP.<br>Rumus:<br>Survei kepuasan masyarakat sesuai dengan Permen Pan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik                               |
| 5   | SK.5 Terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan fasilitas pelabuhan                  | IKK. 8            | Terwujudnya dokumen dan penetapan rencana induk pelabuhan dan DLKr DLkp  |        |         |   |
|     |  |                   | - Terwujudnya dokumen dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan  | %      | 70      | Indikator Kinerja adalah terselesaikannya penyusunan dokumen sesuai dengan petunjuk teknis, diterbitkannya rekomendasi dari pemerintah daerah, sampai dengan penetapan oleh menteri perhubungan<br>Percentase pencapaian:<br>- Tersusunnya dokumen= 30%<br>- Diterbitkan rekomendasi dari seluruh pemda terkait secara lengkap=70%<br>- Ditetapkan oleh menteri =100% |
|     |  | IKK. 9            | - Terwujudnya dokumen dan penetapan DLKr dan DLkp.   | %      | 50      | Indikator Kinerja adalah terselesaikannya penyusunan dokumen sesuai dengan petunjuk teknis, diterbitkannya rekomendasi dari pemerintah daerah, sampai dengan penetapan oleh menteri perhubungan<br>Percentase pencapaian:<br>- Tersusunnya dokumen= 30%<br>- Diterbitkan rekomendasi dari seluruh pemda terkait secara lengkap=70%<br>- Ditetapkan oleh menteri =100% |
| 6   | SK.6 Meningkatnya penyediaan fasilitas pelabuhan serta sarana pelayanan lainnya sesuai | IKK. 10           | Persentase fasilitas daratan (terminal, gudang, bunker, perkantoran, jaringan jalan, dan prasarana pendukung lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan | %      | 100     | Indikator Kinerja fasilitas daratan yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan adalah persentase perbandingan antara jumlah fasilitas daratan yang telah tersedia oleh  |

| NO. | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | SATUAN | RUMUSAN   |
|-----|--|---|---|--------|---|
|     | yang ditetapkan dalam masterplan pelabuhan, baik yang disediakan oleh penyelenggara pelabuhan maupun badan usaha pelabuhan | Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan   |   |        | Penyelenggara Pelabuhan/BUP dengan jumlah fasilitas daratan sesuai dengan Masterplan/RIP dalam satu priode<br><br>Rumus:<br>$\% = \frac{\text{Jumlah fasilitas daratan yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas daratan sesuai RIP}} \times 100\%$  |
|     | IKK. 11  | Percentase fasilitas perairan (penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, SBNP, dermaga, dan prasarana pendukungan lainnya) yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan | %   | 100    | Indikator Kinerja fasilitas perairan yang disediakan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan baik yang disediakan Penyelenggara Pelabuhan maupun Badan Usaha Pelabuhan adalah persentase perbandingan antara jumlah fasilitas perairan yang telah tersedia oleh Penyelenggara Pelabuhan/BUP dengan jumlah fasilitas perairan sesuai dengan Masterplan/RIP dalam satu priode<br><br>Rumus:<br>$\% = \frac{\text{Jumlah fasilitas perairan yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas perairan sesuai RIP}} \times 100\%$              |
|     | IKK. 12  | Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan   |   |        | Indikator Kinerja adalah persentase pemenuhan kebutuhan SDM, sarana bantu dan prasarana pemanduan<br><br>Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal  |
|     |  | - SDM pemanduan   | %   | 80     | Rumus:<br>$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$<br>A = Jumlah SDM pandu yang tersedia<br>B = Jumlah kebutuhan SDM pandu   |
|     |  | - Sarana bantu pemanduan  | %   | 80     | Rumus:<br>$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$<br>A = Jumlah Sarana Bantu pemanduan yang tersedia<br>B = Jumlah kebutuhan Sarana Bantu pemanduan   |
|     |  | - Prasarana pemanduan   | %   | 80     | Rumus:<br>$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$<br>A = Jumlah Prasarana pemanduan yang tersedia<br>B = Jumlah kebutuhan Prasarana pemanduan   |
|     | IKK. 13  | Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan  |   |        | Indikator Kinerja Tingkat kesiapan peralatan pelabuhan adalah perbandingan jumlah waktu siap operasi ( <i>Available Time</i> ) dengan waktu tersedia ( <i>Possible Time</i> ) yang dinyatakan dalam persentase (%)<br><br>Rumus:<br>$\text{Availability} = \frac{\text{Waktu Siap Operasi (Available Time)}}{\text{Waktu Tersedia (Possible Time)}} \times 100\%$<br><br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan |
| 7   | SK.7 Meningkatnya penjaminan keselamatan kerja di pelabuhan  | IKK. 14   | Tingkat pemenuhan standarisasi peralatan di pelabuhan |        | Indikator Kinerja adalah persentase jumlah peralatan yang memenuhi persyaratan standarisasi peralatan dibuktikan dengan sertifikat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (sertifikat laik pakai dan sertifikat operator), dalam satuan persentase (%)<br><br>Rumus:<br>$\% = (\text{Jumlah peralatan yang telah mendapatkan sertifikat dari Ditjen})$   |
|     |  |   | - JICT (TPK)  | %      | 80  |
|     |  |   | - KOJA (TPK)  | %      | 80  |
|     |  |   | - IKT (Car Terminal)                                  | %      | 85  |
|     |  |   | - Terminal MAL  | %      | 80  |
|     |  |   | - IPC TPK Area I                                      | %      | 70  |
|     |  |   | - IPC TPK Area II                                     | %      | 75  |
|     |  |   | - PTP Wilayah I                                       | %      | 80  |
|     |  |   | - PTP Wilayah II                                      | %      | 90  |
|     |  |   | - NPCT1   | %      | 80  |

| NO. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA | SATUAN   | SATUAN | RUMUSAN  |
|-----|---|-------------------|--|--------|--|
|     |   |                   |  |        | <p>Perhubungan Laut / jumlah peralatan yang tersedia) x 100%</p> <p>Sumber: Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan NO. PP.72/3/9-99 dan KEP.507/BW/1999 tentang Pemeriksaan dan Pengujian terhadap pesawat angkat dan angkut, pesawat uap dan bejana tekan yang berada di kapal dan di pelabuhan</p>  |
| 8   | SK.8<br>Meningkatnya penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dalam rangka mewujudkan pelabuhan tanjung priok menjadi pelabuhan greenport/ ecoport | IKK. 15           | <p>Tercapainya kualitas lingkungan sesuai baku mutu yang ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Baku mutu Udara</li> <li>- Indeks Baku mutu Air</li> <li>- Indeks Baku mutu kebisingan</li> </ul> | %      | <p>Indikatornya adalah persentase pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan di bandingkan dengan jumlah titik pemantauan dan jumlah parameter baku mutu</p> <p>Rumusan:<br/> <math display="block">\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%</math></p> <p>Ket:<br/> A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan<br/> B= jumlah titik pemantauan<br/> C=jumlah parameter baku mutu</p> <p>Rumusan:<br/> <math display="block">\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%</math></p> <p>Ket:<br/> A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan<br/> B= jumlah titik pemantauan<br/> C=jumlah parameter baku mutu</p> <p>Rumusan:<br/> <math display="block">\frac{A}{(B \times C)} \times 100\%</math></p> <p>Ket:<br/> A= Jumlah pemenuhan parameter baku mutu dari semua titik pemantauan<br/> B= jumlah titik pemantauan<br/> C=jumlah parameter baku mutu</p> |
|     |   | IKK. 16           | Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities  | %      | <p>Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities adalah persentase pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup</p> <p>Rumus:<br/> % = (kondisi lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities / persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup) x 100%</p>   |
|     |   | IKK. 17           | Tingkat penggunaan reception facilities di pelabuhan   | %      | <p>Indikator Kinerja penggunaan reception facilities di pelabuhan adalah persentase pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, dan fasilitas tambahan reception facilities sesuai dengan peraturan lingkungan hidup</p> <p>Rumus:<br/> % = <math>\frac{A}{(B)} \times 100\%</math></p> <p>A= Jumlah kapal yang tercatat membuang limbah ke RF Pelabuhan Tanjung Priok</p>   |

| NO. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | SATUAN          | RUMUSAN   |
|-----|---|---|---------|-----------------|---|
|     |   |   |         |                 | B= jumlah kunjungan kapal (data inaportnet)   |
| 9   | SK.9<br>Meningkatnya kinerja operasional pelabuhan dalam rangka pemenuhan standar kinerja yang ditetapkan | IKK.18<br><br>Waiting Time<br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- IKT (Car Terminal)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK<br>- PTP<br>- NPCT1   | Jam     | 1               | Indikator <i>waiting time</i> adalah waktu pelayanan pandu yang didapatkan dari perhitungan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk dengan pandu naik ke atas kapal ( <i>pilot on board/POB</i> ) pada pelayanan kapal masuk.<br>Rumus:<br>$\text{Waiting Time (WT)} = \text{Waktu Pelayanan} (\textit{pilot on board/POB}) - \text{Waktu Penetapan Pelayanan Masuk}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  |
|     |   | IKK.19<br><br>Approaching-Time<br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- IKT (Car Terminal)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK<br>- PTP<br>- NPCT1   | Jam     | 2               | Indikator <i>Approach Time</i> adalah waktu pelayanan kapal dari lokasi labuh sampai menuju tambatan. Untuk kapal masuk dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai ikat tali di tambatan ( <i>first line</i> ) dan untuk kapal keluar dihitung mulai lepas tali ( <i>last line</i> ) sampai dengan kapal mencapai ambang luar.<br>Rumus:<br>$\text{Approach Time (AT)} = (\text{kapal mulai bergerak s.d ikat tali}) + (\text{lepas tali s.d pandu turun})$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan |
|     |   | IKK.20<br><br>Efektif Time : Berthing Time<br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- IKT (Car Terminal)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I TPK 009<br>- IPC TPK Area I TPK Konvensional<br>- IPC TPK Area II Konvensional<br>- IPC TPK Area II TPK<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri<br>- PTP Wilayah II Luar Negeri<br>- NPCT1 | %       | 85              | Indikator <i>Efektif Time : Berthing Time</i> adalah perbandingan waktu berkerja efektif ( <i>Effective Time/ET</i> ) dengan waktu kapal selama di tambatan ( <i>Berthing Time/BT</i> )<br>Rumus:<br>$\text{ET/BT} = \frac{\text{Effective Time (ET)}}{\text{Berthing Time (BT)}}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  |
| 10  | SK.10<br>Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pelabuhan                               | IKK.21<br><br>Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri<br>- PTP Wilayah II Luar Negeri   | (T/G/J) | 65<br>70<br>140 | Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional General Cargo Adalah jumlah ton barang General Cargo yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat<br>Rumus:<br>$\text{T/G/H} = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET) x Jumlah Gang Kerja}}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja   |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN             | SATUAN            | RUMUSAN  |
|-----|---------|--|--------------------|-------------------|--|
|     |         |  |                    |                   | Pelayanan Operasional Pelabuhan  |
|     | IKK.22  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bag Cargo<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri<br>- PTP Wilayah II Luar Negeri    | (T/G/J)            | 67<br>40<br>57    | Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Bag Cargo Adalah jumlah ton barang Bag Cargo yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat<br><b>Rumus:</b><br>$T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  |
|     | IKK.23  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries<br>- IKT (Car Terminal)<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri           | (U/S/H)<br>(T/G/J) | 125<br>35<br>35   | Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada Car Terminal adalah jumlah Kendaraan yang dibongkar/muat perkapal dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat<br><b>Rumus:</b><br>$U/S/H = \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang dibongkar/muat (Unit)}}{\text{Waktu Tambat}}$<br>Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Uncarries Adalah jumlah ton barang Uncarries yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat<br><b>Rumus:</b><br>$T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan |
|     | IKK.24  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri<br>- PTP Wilayah II Luar Negeri   | (T/G/J)            | 65<br>65<br>135   | Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Cair Adalah jumlah ton barang Curah Cair yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat<br><b>Rumus:</b><br>$T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  |
|     | IKK.25  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II Dalam Negeri<br>- PTP Wilayah II Luar Negeri | (T/J)              | 120<br>200<br>125 | Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Curah Kering Adalah jumlah ton barang Curah Kering yang di bongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat<br><b>Rumus:</b><br>$T/G/H = \frac{\text{Jumlah barang yang dibongkar/muat (Ton)}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$  |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | SATUAN  | RUMUSAN  |
|-----|---------|--|--------|---------|--|
|     |         |  |        |         | <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p>  |
|     | IKK.26  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Livestock<br><br>- PTP Wilayah II Luar Negeri  |        | (H/G/J) | <p>Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Life Stock adalah jumlah ton hewan yang dibongkar/muat dalam satu jam kerja oleh tiap Gang buruh (TKBM) atau alat bongkar muat</p> <p>Rumus :</p> $H/G/J = \frac{\text{Jumlah hewan yang dibongkar/muat (H)}}{\text{Jumlah Efektif (ET)} \times \text{Jumlah Gang Kerja}}$  |
|     | IKK.27  | Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat<br><br>- PTP Wilayah I<br>- IKT (Car Terminal)   |        | (U/S/H) | <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p> <p>Indikator Kinerja bongkar muat barang non petikemas pada terminal multipurpose / konvensional Un Carries Alat Berat adalah jumlah Alat Berat yang dibongkar/muat perkapal dalam 1 (satu) jam selama kapal bertambat</p> <p>Rumus:</p> $U/S/H = \frac{\text{Jumlah Alat Berat yang dibongkar/muat (Unit)}}{\text{Waktu Tambat}}$   |
|     | IKK.28  | Kinerja bongkar muat barang Petikemas<br><br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I TPK 009<br>- IPC TPK Area I TPK Konvensional<br>- IPC TPK Area II Konvensional<br>- IPC TPK Area II TPK<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II<br>- NPCT 1 |        | (B/C/H) | <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p> <p>Indikator Kinerja bongkar muat barang Petikemas adalah jumlah Petikemas yang dibongkar/muat tiap crane (Container Crane, Ships Crane, Shore Crane)</p> <p>Rumus:</p> $B/C/H = \frac{\text{Jumlah Peti Kemas yang dibongkar/muat}}{\text{Jumlah jam efektif (ET)} \times \text{Jumlah Crane}}$   |
|     | IKK.29  | Rata-rata receiving peti kemas<br><br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I<br>- IPC TPK Area II<br>- NPCT 1  |        | Menit   | <p>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p> <p>Indikator Kinerja receiving peti kemas adalah kecepatan pelayanan penerimaan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk dengan satuan menit</p> <p>Rumus:</p> <p>Waktu penerimaan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu masuk dengan satuan menit</p> <p>Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 002/38/13/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan</p> |
|     | IKK.30  | Rata – rata delivery peti kemas<br><br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)  |        | Menit   | <p>Indikator Kinerja delivery peti kemas adalah kecepatan pelayanan penyerahan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar</p>   |

| NO. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN  | SATUAN   | RUMUSAN   |  |
|-----|---|---|---|--|---|--|
|     |   | - Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I<br>- IPC TPK Area II<br>- NPCT 1   | Menit   | 60<br>50<br>60<br>75   | yang dicatat di pintu keluar dengan satuan menit<br><br>Rumus:<br>Waktu penyerahan di Terminal petikemas yang dihitung sejak alat angkut masuk hingga keluar yang dicatat di pintu keluar dengan satuan menit<br><br>Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 002/38/13/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan  |  |
|     | IKK.31  | Tingkat penggunaan dermaga (BOR)<br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- IKT (Car Terminal)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I TPK 009<br>- IPC TPK Area I TPK Konvensional<br>- IPC TPK Area II Konvensional<br>- IPC TPK Area II TPK<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II<br>- NPCT1  | %   | 70<br>70<br>70<br>70<br>60<br>60<br>60<br>60<br>70<br>70<br>70<br>70 | Indikator Kinerja Tingkat penggunaan dermaga (BOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian waktu tiap dermaga yang tersedia dengan jumlah waktu tersedia dalam satu periode (bulan/tahun) yang dinyatakan dalam persentase (%)<br><br>Rumus:<br>$BOR = \frac{(n_{Call} \times (\bar{LOA} + 5)) \times (n_{Berthing\ Time})}{Panjang Dermaga \times Waktu tersedia dim satu periode}$<br>( n Call = jumlah Call, $\bar{LOA}$ = rata-rata, n Berthing Time = Rata-rata waktu bertambat)<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan |  |
|     | IKK.32  | Tingkat penggunaan gudang (SOR)<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II  | %   | 70<br>70   | Indikator Kinerja Tingkat penggunaan gudang (SOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian ruang penumpukan gudang yang dihitung dalam satuan ton hari atau satuan m <sup>3</sup> hari dengan kapasitas efektif penumpukan tersedia dalam satu periode<br><br>Rumus:<br>$SOR = \frac{\sum_{i=1}^n (Ton/m^3 \text{ Barang} \times \text{Rata-rata lama penumpukan}_i)}{\text{Kapasitas efektif penumpukan (Ton atau } m^3 \text{)} \times \text{Periode}} \times 100\%$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan                 |  |
|     | IKK.33  | Tingkat penggunaan lapangan (YOR)<br>- JICT (TPK)<br>- KOJA (TPK)<br>- IKT (Car Terminal)<br>- Terminal MAL<br>- IPC TPK Area I TPK 009<br>- IPC TPK Area I TPK Konvensional<br>- IPC TPK Area II Konvensional<br>- IPC TPK Area II TPK<br>- PTP Wilayah I<br>- PTP Wilayah II<br>- NPCT1 | %   | 65<br>65<br>65<br>65<br>60<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65 | Indikator Kinerja Tingkat penggunaan lapangan (YOR) adalah perbandingan antara jumlah pemakaian lapangan penumpukan yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m <sup>3</sup> /hari atau TEUs/hari dengan kapasitas efektif lapangan penumpukan tersedia dalam satu priode<br><br>Rumus:<br>$YOR = \frac{\sum_{i=1}^n (Ton/m^3/TEUs \times \text{Rata-rata lama penumpukan}_i)}{\text{Kap. Efektif lapangan dalam satuan Ton/m}^3/\text{TEUs} \times \text{Periode}} \times 100\%$<br>Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/2/DJPL-17 tentang Pedoman Perhitungan Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan          |  |
| 11  | SK.11<br>Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan laut | IKK.34  | Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet | %  | 100   | Indikator Kinerja Persentase pelayanan kapal yang menggunakan Sistem Inaportnet adalah persentase perbandingan antara jumlah kapal yang menggunakan pelayanan Inaportnet dengan jumlah total kapal yang berkunjung dalam satu priode |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | SATUAN | RUMUSAN   |
|-----|---------|--|--------|--------|---|
|     |         |  |        |        | <p>Rumus:<br/> <math display="block">\% = \frac{\text{Jumlah kapal melalui pelayanan Inaportnet}}{\text{Jumlah total kapal yang berkunjung}} \times 100\%</math></p>  |
|     | IKK. 35 | Persentase Pelayanan kegiatan B/M barang yang menggunakan sistem Inaportnet        | %      | 100    | <p>Indikator Kinerja Persentase pelayanan B/M barang yang menggunakan Sistem Inaportnet adalah persentase perbandingan antara jumlah B/M barang yang menggunakan pelayanan Inaportnet dengan jumlah total barang yang B/M di Pelabuhan dalam satu priode.</p> <p>Rumus:<br/> <math display="block">\% = \frac{\text{Jumlah B/M brg melalui pelayanan Inaportnet}}{\text{Jumlah total barang yang B/M di Pelabuhan}} \times 100\%</math></p>   |
|     | IKK. 36 | Tercapainya penyelenggaraan angkutan lebaran yang lancar, aman, nyaman dan selamat | %      | 100    | <p>Adalah indikator terlaksananya penyelenggaraan angkutan lebaran yang lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (zero accident)</p> <p>Rumusan:</p> <p>Penilaian terdiri dari 4 aspek yaitu lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (zero accident) dimana masing-masing pembobotan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lancar (ketepatan waktu) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 = jumlah perjalanan tepat waktu 75-100%</li> <li>- 15 = jumlah perjalanan tepat waktu 35-74%</li> <li>- 0 = jumlah perjalanan tepat waktu 0-34%</li> </ul> </li> <li>b) Aman (tidak ada gangguan keamanan) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= jumlah laporan gangguan keamanan 0-4</li> <li>- 15= jumlah laporan gangguan keamanan 5-10</li> <li>- 0= jumlah laporan gangguan keamanan &gt;10</li> </ul> </li> <li>c) Nyaman (survey kepuasan penumpang) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= 75-100% responden puas atau nyaman</li> <li>- 15= 35-74% responden puas/nyaman</li> <li>- 0= 0-34% responden puas/nyaman</li> </ul> </li> <li>d) Keselamatan (zero accident) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= tidak ada kecelakan</li> <li>- 15= ada kecelakaan, namun tidak ada korban jiwa</li> <li>- 0= ada kecelakaan dengan korban jiwa</li> </ul> </li> </ul> |

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | SATUAN | RUMUSAN   |
|-----|---------|---|--------|--------|---|
|     |         | Tercapainya penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar, aman, nyaman dan selamat | %      | 100    | <p>Adalah indicator terlaksananya penyelenggara Angkutan Natal dan Tahun Baru yang lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (<i>zero accident</i>)</p> <p>Rumusan:</p> <p>Penilaian terdiri dari 4 aspek yaitu lancar (ketepatan waktu), aman (tidak ada laporan gangguan keamanan), nyaman, dan keselamatan (<i>zero accident</i>) dimana masing-masing pembobotan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lancar (ketepatan waktu) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 = jumlah perjalanan tepat waktu 75-100%</li> <li>- 15 = jumlah perjalanan tepat waktu 35-74%</li> <li>- 0 = jumlah perjalanan tepat waktu 0-34%</li> </ul> </li> <li>b) Aman (tidak ada gangguan keamanan) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= jumlah laporan gangguan keamanan 0-4</li> <li>- 15= jumlah laporan gangguan keamanan 5-10</li> <li>- 0= jumlah laporan gangguan keamanan &gt;10</li> </ul> </li> <li>c) Nyaman (survey kepuasan penumpang) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= 75-100% responden puas atau nyaman</li> <li>- 15= 35-74% responden puas/nyaman</li> <li>- 0= 0-34% responden puas/nyaman</li> </ul> </li> <li>d) Keselamatan (<i>zero accident</i>) maksimal 25% <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25= tidak ada kecelakan</li> <li>- 15= ada kecelakaan, namun tidak ada korban jiwa</li> <li>- 0= ada kecelakaan dengan korban jiwa</li> </ul> </li> </ul> |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 :

- 1 Program Infrastruktur Konektivitas :
- 2 Program Dukungan Manajemen :

Rp. 31.647.034.000,-

Rp 12.564.330.000,-

Rp. 19.082.704.000,-

DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN  
UTAMA TANJUNG PRIOK

Dr. Capt. WISNU HANDOKO, M.Sc  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731031 199903 1 002